

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan atau “*policy*” menurut Carl Friedrich yang dikutip oleh Abdul Wahab (2005:3) adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Sedangkan menurut Anderson yang juga dikutip oleh Abdul Wahab (2005:3) kebijakan merupakan langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan langkah atau tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan berkenaan dengan suatu masalah yang dihadapi.

2. Pengertian Kebijakan Publik

Pemahaman mengenai kebijakan publik masih terjadi adanya silang pendapat dari para ahli. Namun dari beberapa pendapat mengenai kebijakan publik terdapat beberapa persamaan, diantaranya yang disampaikan oleh Thomas R. Dye dikutip oleh Soenarko (2000:41) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apa saja yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Riant Nugroho dikutip oleh Yuwono (2008:4) yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh pemerintah sebagai tokoh sentral kebijakan publik.

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Dimock dalam bukunya *Public Administration* yang lebih mengarah pada pendapat dan keinginan rakyat. Menurut Dimock yang dikutip oleh Soenarko (2000:42) kebijakan publik adalah perpaduan dan kristalisasi dari pendapat-pendapat dan keinginan-keinginan banyak orang dan golongan-golongan dalam masyarakat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah produk dari pemerintah untuk mengatasi persoalan-persoalan publik dan atau untuk memenuhi keinginan-keinginan publik secara tepat, cepat, dan akurat sehingga apa yang dilakukan atau yang tidak dilakukan oleh pemerintah dipandang sebagai sebuah pilihan kebijakan.

B. Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Abdul Wahab (2005:59) menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Oleh sebab itu tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Bahkan Udoji yang dikutip oleh Abdul Wahab (2005:59) mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-

kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Mazmanian dan Sabatier dikutip oleh Abdul Wahab (2005:68) menjelaskan implementasi itu adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan pengadilan. Apabila satu kebijakan dianalisis (perumusannya) dan dirumuskan, langkah selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan, dan melakukan pengendalian pelaksanaan kebijakan tersebut.

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier mengemukakan bahwa kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang muncul setelah sebuah kebijakan disahkan merupakan fokus perhatian dari implementasi kebijakan.

Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Abdul Wahab, 2005:65).

Sedangkan Parsons (2006:463) mengemukakan bahwa Studi impelementasi adalah studi perubahan. Bagaimana perubahan terjadi, bagaimana kemungkinan perubahan bisa dimunculkan. Hal ini juga merupakan studi tentang mikrostruktur dari kehidupan politik. Bagaimana organisasi di luar dan di dalam sistem politik menjalankan urusan mereka dan berinteraksi satu sama lain, apa motivasi-motivasi mereka bertindak seperti itu, dan apa motivasi lain yang mungkin membuat mereka bertindak secara berbeda. Pendapat lain tentang implementasi

dikemukakan oleh Anderson dikutip oleh Parsons (2006:464) yang mengartikan implementasi sebagai pelaksanaan pembuatan kebijakan dengan cara-cara lain.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan implementasi kebijakan adalah pelaksanaan pembuatan kebijakan dalam bentuk undang-undang, perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif dengan fokus daripada impementasi tersebut adalah untuk memahami kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan.

2. Tahapan dan Proses Implementasi Kebijakan

Untuk mengidentifikasi kebijakan yang ditetapkan, maka perlu adanya tahap-tahap implementasi kebijakan. Tahap implementasi kebijakan ada dua bentuk, yaitu:

- a. Bersifat *self-excuting*, yang berarti bahwa dengan merumuskan dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara.
- b. Bersifat *non-self-excuting* artinya bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya untuk pembuatan kebijakan tercapai (Islamy, 2001:102).

Dalam melakukan sebuah implementasi kebijakan, perlu diperhatikan tahap-tahap yang ada. Mark Lewis A. Gun yang dikutip oleh Abdul Wahab (2005) mengemukakan sejumlah tahap implementasi kebijakan sebagai berikut:

- a. Tahap pertama meliputi kegiatan-kegiatan: menggabungkan rencana suatu program dengan tujuan secara jelas, menentukan standar pelaksana, menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan.

- b. Tahap kedua merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur, sumber daya, prosedur, biaya dan metode.
- c. Tahap ketiga meliputi kegiatan-kegiatan menentukan jadwal, melakukan pemantauan, mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran program, dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat segera diambil tindakan yang sesuai.

Jadi, proses implementasi kebijakan tidak mempersoalkan tujuan pembuatan kebijakan, tetapi merupakan kontinuitas dari pembuatan kebijakan yaitu ketika kebijakan tersebut telah selesai dirumuskan maka proses implementasi dimulai. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial.

3. Model Implementasi Kebijakan

Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III dikutip oleh Nawawi (2009) menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses implementasi suatu kebijakan. Faktor-faktor ini perlu diperhatikan agar sebuah kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik sehingga tujuan atau sasaran dari kebijakan tersebut dapat tercapai. Berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu:

a. Komunikasi

“Komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan

pencapaian tujuan dari implementasi publik” (Agustino, 2006:157). Implementasi yang efektif akan terlaksana jika para pembuat kebijakan mengetahui mengenai apa yang mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pembuat kebijakan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik.

Terdapat dua indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan variabel komunikasi. George C. Edward III yang dikutip oleh Agustino (2006:157-158) mengemukakan indikator tersebut sebagai berikut:

1) Transmisi

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyampaian komunikasi yaitu adanya salah pengertian yang disebabkan karena banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan. Menurut George C. Edward III terdapat beberapa hambatan umum yang biasa terjadi dalam transmisi komunikasi.

- a) Pertama, terdapat pertentangan antara pelaksana kebijakan dengan perintah yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan. Pertentangan seperti ini akan mengakibatkan distorsi dan hambatan yang langsung dalam komunikasi kebijakan.
- b) Kedua, informasi yang disampaikan melalui berlapis-lapis hierarki birokrasi. Distorsi komunikasi dapat terjadi karena panjangnya rantai informasi yang dapat mengakibatkan bias informasi.
- c) Ketiga, masalah penangkapan informasi juga diakibatkan oleh persepsi dan ketidakmampuan para pelaksana dalam memahami persyaratan-persyaratan suatu kebijakan (Winarno, 2005:127).

2) Kejelasan

Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/mendua. Dalam kejelasan

informasi biasanya terdapat kecenderungan untuk mengaburkan tujuan-tujuan informasi oleh pelaku kebijakan atas dasar kepentingan sendiri dengan cara mengintrepetasikan informasi berdasarkan pemahaman sendiri-sendiri. Cara untuk mengantisipasi tindakan tersebut adalah dengan membuat prosedur melalui pernyataan yang jelas mengenai persyaratan, tujuan, menghilangkan pilihan dari multi intrepetasi, melaksanakan prosedur dengan hati-hati dan mekanisme pelaporan secara terinci.

b. Sumber Daya

Menurut George C. Edward III yang dikutip oleh Agustino (2006:158-159), sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari:

1) Staf

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.

2) Informasi

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk. Pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

3) Wewenang

Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan. Tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya.

4) Fasilitas

Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel, dan kompeten. Tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung

(sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

c. Disposisi atau Sikap

Menurut George C. Edward III yang dikutip oleh Winarno (2005:142) mengemukakan kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan menurut George C. Edward III terdiri dari:

1) Pengangkatan Birokrasi

Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

2) Manipulasi Insentif

Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan

perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi (Agustino, 2006:159).

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik. Menurut George C. Edward III yang dikutip oleh Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yaitu:

1) *Standard Operational Procedure (SOP)*

”*Standard operational procedure (SOP)* merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas” (Winarno, 2005:150). Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum diberbagai sektor publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat

menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan.

2) Fragmentasi

George C. Edward III yang dikutip oleh Winarno (2005:155) mengatakan bahwa fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan.

C. Program

Dalam kebijakan publik dikenal istilah program. Kayatomo (1985:162) mengatakan bahwa program adalah rangkaian aktifitas yang mempunyai saat permulaan yang harus dilaksanakan serta diselesaikan untuk mendapatkan suatu tujuan.

Dilaksanakannya suatu program tidak hanya menyiratkan rencana yang kongkrit, akan tetapi diimbangi dengan budget/anggaran program tersebut. Selanjutnya dapat dilihat dalam pengertian program yang dikemukakan oleh Westra dkk (1989:236) yang mendefinisikan program sebagai rumusan yang memuat gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan beserta petunjuk cara-cara pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat bahwa program tidak saja tercantum tujuan kebijaksanaan serta tindakan, prosedur atau aturan-aturan akan tetapi disertai pula dengan budget atau anggaran. Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa program merupakan pedoman (rumusan tindakan yang terencana) dalam

melaksanakan rangkaian-rangkaian kegiatan yang didukung oleh ketersediaan anggaran, sehingga tujuan program dapat tercapai.

Suatu hal yang harus diperhatikan bahwa di dalam proses pelaksanaan suatu program sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak ada menurut Abdullah (1987) antara lain sebagai berikut:

1. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan.
2. Target group, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut dalam bentuk perubahan dan peningkatan.
3. Unsur pelaksana (implementer) baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sebelum suatu program diimplementasikan, terlebih dahulu harus diketahui secara jelas mengenai uraian pekerjaan yang dilakukan secara sistematis, tata cara pelaksanaan, jumlah anggaran yang dibutuhkan, dan kapan waktu pelaksanaannya agar program yang direncanakan dapat mencapai target yang sesuai dengan yang diharapkan.

D. Program TPST 3R Berbasis Masyarakat

1. Tujuan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai

sumber daya. Pengelolaan sampah tersebut terdiri dari pengurangan sampah dan penanganan sampah. Untuk pengurangan sampah dapat meliputi: pembatasan timbulan sampah, pendaurulangan sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan untuk penanganan sampah meliputi: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Pengurangan sampah tersebut juga sejalan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 21/PRT/M/2006, khususnya kebijakan (1) yaitu pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya. Untuk mendorong usaha pengurangan sampah dari sumbernya, Kementerian Pekerjaan Umum telah melakukan pilot project di beberapa kawasan untuk pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R Berbasis Masyarakat.

TPST 3R Berbasis Masyarakat merupakan paradigma baru dalam pengelolaan sampah. Paradigma baru tersebut lebih ditekankan kepada metode pengurangan sampah yang lebih arif dan ramah lingkungan. Metode tersebut lebih menekankan kepada tingkat perilaku konsumtif dari masyarakat serta kesadaran masyarakat terhadap kerusakan lingkungan akibat bahan tidak terpakai lagi yang berbentuk sampah. Pengurangan sampah dengan metode 3R berbasis masyarakat lebih menekankan kepada cara pengurangan sampah yang dibuang oleh individu, rumah, atau kawasan seperti RT atau RW.

2. Tindakan

Dalam Pengelolaan Sampah 3R Berbasis Masyarakat terdapat tiga kegiatan yang harus dilakukan secara sinergi dan berkesinambungan, yaitu:

- 1) Proses pengelolaan sampah sejak dikeluarkan oleh masyarakat.

- 2) Proses pemahaman masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan metode 3R.
- 3) Proses pendampingan kepada masyarakat pelaku 3R.

Untuk mewujudkan konsep 3R salah satu cara penerapannya adalah melalui TPST 3R Berbasis Masyarakat, yang diarahkan kepada daur ulang sampah (*recycle*). Hal ini dipertimbangkan sebagai upaya mengurangi sampah sejak dari sumbernya, karena adanya potensi pemanfaatan sampah organik sebagai bahan baku kompos dan komponen non organik sebagai bahan baku sekunder kegiatan industri seperti plastik, kertas, logam, gelas, dan lain-lain.

Reduce (R1)

Reduce atau reduksi sampah merupakan upaya untuk mengurangi timbulan sampah di lingkungan sumber dan bahkan dapat dilakukan sejak sebelum sampah dihasilkan, setiap sumber dapat melakukan upaya reduksi sampah dengan cara merubah pola hidup konsumtif, yaitu perubahan kebiasaan dari yang boros dan menghasilkan banyak sampah menjadi hemat/efisien dan sedikit sampah, namun diperlukan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk merubah perilaku tersebut.

Reuse (R2)

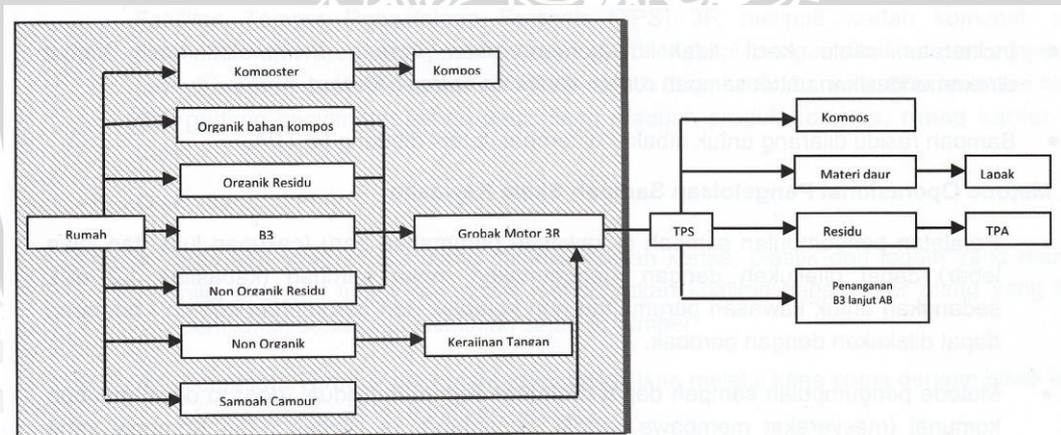
Reuse berarti menggunakan kembali bahan atau material agar tidak menjadi sampah (tanpa melalui proses pengelolaan) seperti menggunakan kertas bolak-balik, menggunakan kembali botol bekas minuman untuk tempat air, mengisi kaleng susu dengan susu isi ulang (*refill*) dan lain-lain.

Recycle (R3)

Recycle berarti mendaur ulang suatu bahan yang tidak berguna (sampah) menjadi bahan lain setelah melalui proses pengelolaan seperti mengolah sisa kain perca untuk menjadi selimut, kain lap, keset kaki, dsb atau mengolah botol/plastik bekas menjadi biji plastik untuk dicetak kembali menjadi ember, hanger, pot, dan sebagainya atau mengolah kertas bekas menjadi bubur kertas dan kembali dicetak menjadi kertas dengan kualitas sedikit lebih rendah dan lain-lain.

3. Prosedur

Gambar 1
Metode Operasional Penanganan Sampah Skala Kawasan



Sumber: Buku Pedoman Umum Penyelenggaraan Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R Berbasis masyarakat

a) Landasan Operasional Pengelolaan Sampah Skala Kawasan

- Perlu dibedakan tipe kawasan seperti kawasan kompleks perumahan teratur (cakupan pelayanan 1000-2000 unit rumah), kawasan perumahan semi teratur/non kompleks (cakupan pelayanan 1 RW) dan

kawasan perumahan tidak teratur/kumuh atau perumahan di bantar sungai.

- Diperlukan keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya pengurangan volume dan pemilahan sampah
- Diperlukan operasional pengelolaan sampah mulai dari sumber, pengangkutan/pengumpulan, pemilahan sampah, pihak penerima bahan daur ulang (lapak) dan pengangkutan ke TPA.
- Diperlukan area kerja pengelolaan sampah skala kawasan yang disebut TPS 3R (Tempat Pengelolaan Sampah), yaitu area pembongkaran muatan gerobak, pemilahan, perajangan sampah, pengomposan, tempat/*container* sampah residu, penyimpanan barang lapak, dan pencucian.
- Kegiatan pengelolaan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R meliputi: pemilahan sampah, pembuatan kompos, pengepakan bahan daur ulang, dll.
- Pemisahan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R dilakukan untuk beberapa jenis sampah seperti sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) Rumah Tangga (selanjutnya akan dikelola sesuai dengan ketentuan), sampah kertas, plastik, logam/kaca (akan digunakan sebagai bahan daur ulang) dan sampah organik (akan digunakan sebagai bahan baku kompos).

- Pembuatan kompos di Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R dapat dilakukan dengan berbagai metode, antara lain Open Windrow dan Caspary.
- *Incenerator* skala kecil tidak direkomendasikan karena *incenerator* kecil hanya direkomendasikan untuk sampah rumah sakit dan sampah khusus.
- Sampah residu dilarang untuk dibakar di tempat, tapi dibuang ke TPA.

b) Metode Operasional Pengelolaan Sampah Skala Kawasan

- Peralatan pengumpulan sampah di kawasan perumahan baru (cakupan luas dan jalan lebar) dapat dilakukan dengan menggunakan motor sampah (kapasitas 1,2 m³), sedangkan untuk kawasan perumahan non kompleks dan perumahan kumuh/bantaran sungai dapat dilakukan dengan gerobak.
- Metode pengumpulan sampah dapat dilakukan secara individual (*door to door*) maupun komunal (masyarakat membawa sendiri sampahnya ke Wadah/Bin Komunal yang sudah ditentukan).
- Motor/gerobak sampah yang mengumpulkan sampah terpilah dapat dimodifikasi dengan sekat atau dilengkapi karung-karung besar (3 unit atau sesuai dengan jenis sampah).

c) Tempat Pengelolaan Sampah (TPS)

Jadwal pengumpulan sampah non organik terpilah seperti kertas, plastik, logam/kaca dapat dilakukan seminggu sekali, sedangkan untuk sampah

yang masih tercampur harus dilakukan minimal seminggu dua kali tergantung kapasitas pelayanan dan tipe kawasan.

Kriteria Tempat Pengelolaan Sampah (TPS)

1) Lokasi

- Luas tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R bervariasi. Untuk kawasan perumahan baru (cakupan pelayanan 2000 rumah) diperlukan TPS 3R dengan luas 1000 m². Sedangkan untuk cakupan pelayanan skala RW (200 rumah), diperlukan Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R dengan luas 200-500 m².
- Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R dengan luas 1000 m² dapat menampung sampah dengan atau tanpa proses pemilahan sampah disumber.
- Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R dengan luas < 500 m² hanya dapat menampung sampah dalam keadaan terpilah 50% dan sampah tercampur 50%.
- Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R dengan luas < 200 m² sebaiknya hanya menampung sampah tercampur 20%, sedangkan sampah yang sudah terpilah 80%.

2) Fasilitas Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R

Fasilitas Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R meliputi wadah komunal, area pemilahan dan area *composting* dan juga dilengkapi dengan fasilitas penunjang lain seperti saluran drainase, tangki air

bersih, *septic tank*, listrik, barrier (pagar tanaman hidup) dan gudang penyimpanan bahan daur ulang maupun produk kompos, ruang kantor dan toilet.

3) Daur Ulang

- Sampah yang didaur ulang minimal adalah kertas, plastik dan logam yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan untuk mendapatkan kualitas bahan daur ulang yang baik, pemilahan sebaiknya dilakukan sejak dari sumber.
- Pemasaran produk daur ulang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak lapak atau langsung dengan industri pemakai.
- Daur ulang sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) Rumah Tangga (terutama batu baterai dan lampu neon) dikumpulkan untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku (PP 18/1999 tentang pengelolaan sampah B3).
- Daur ulang kemasan plastik (air mineral, minuman dalam kemasan, mie instan, dan lain-lain) sebaiknya dimanfaatkan untuk barang-barang kerajinan atau bahan baku lain.

4) Pembuatan Kompos

- Sampah yang digunakan sebagai bahan baku kompos adalah sampah dapur (terseleksi) dan daun-daun potongan tanaman.
- Metode pembuatan kompos dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan *open windrow* dan *caspary*.

Gambar 2
Pengomposan Sistem *Open Windrow*



Sumber: Buku Pedoman Umum Penyelenggaraan Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R Berbasis masyarakat

Gambar 3
Peengomposan Sistem *Caspary*



Sumber: Buku Pedoman Umum Penyelenggaraan Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R Berbasis masyarakat

Peengomposan sistem *Open Windrow* adalah proses pembuatan kompos yang paling sederhana dan paling murah. Bahan baku kompos ditumpuk memanjang dengan 7 tumpukan, tinggi tumpukan 0.6 sampai 1 meter, lebar 2-5 meter. Sistem ini memanfaatkan sirkulasi udara secara alami. Optimalisasi lebar, tinggi dan panjangnya tumpukan sangat dipengaruhi oleh keadaan

bahan baku, kelembaban, ruang pori, dan sirkulasi udara untuk mencapai bagian tengah tumpukan bahan baku. Sedangkan proses pengomposan dengan sistem *Casparry* merupakan proses pengomposan dengan menggunakan alat cetak untuk membentuk sampah dalam bentuk kubus. Proses pengomposan dengan sistem cetak ini digunakan jika lahan yang digunakan tidak terlalu luas. Proses pengomposan dengan sistem cetak lebih agak rumit jika dibandingkan dengan metode *Open Windrow* karena membutuhkan alat cetak. Sifat tumpukan sampah juga lebih padat bila dibandingkan dengan *Open Windrow* sehingga udara yang terperangkap pada tumpukan sampah agak lebih sedikit.

- Perlu dilakukan analisa kualitas terhadap produk kompos secara acak dengan parameter antara lain warna, C/N rasio, kadar N,P,K dan logam berat. Dalam pengecekan analisa kualitas produk kompos, bisa bekerjasama dengan Laboratorium Tanah yang ada di Universitas atau milik Instansi Pemerintah setempat.
- Pemasaran produk kompos dapat bekerjasama dengan pihak Koperasi dan Dinas (Kebersihan, Pertamanan, Pertanian, dan lain-lain).

4. Keberlanjutan Program

Aspek keberlanjutan pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kesinambungan proses pengelolaan yang

sudah terbina. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam beberapa aspek keberlanjutan adalah sebagai berikut:

- Adanya lembaga kelompok masyarakat sebagai organisasi pengelola yang tidak formal namun terlegalisir serta sesuai dengan aspirasi masyarakat.
- Adanya dukungan peraturan setingkat kelurahan untuk pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
- Adanya dana untuk operasional pengelolaan maupun biaya pemeliharaan atau investasi penambahan prasarana dan sarana sesuai dengan kebutuhan. Dana tersebut dapat berasal dari iuran masyarakat serta hasil penjualan kompos atau materi daur ulang dengan *cash flow* diketahui bersama secara transparan.
- Adanya dukungan teknologi ramah lingkungan dan tersedianya prasarana dan sarana persampahan skala kawasan sesuai kebutuhan masyarakat.
- Adanya peran aktif masyarakat untuk melaksanakan program 3R terutama yang berkaitan dengan perubahan perilaku dan budaya memilah sampah sejak dari sumbernya.
- Adanya dukungan dari instansi pengelola sampah tingkat perkotaan untuk pengangkutan residu, penyerapan produk kompos dan material daur ulang serta penanganan lanjutan sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) Rumah Tangga sesuai ketentuan yang berlaku.
- Adanya pendampingan dari LSM, Dinas terkait, atau Fasilitator kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), minimal selama dua tahun.

- Adanya pola monitoring dan evaluasi dari instansi terkait baik ditingkat kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten bahkan ditingkat yang lebih tinggi, yaitu provinsi dan pemerintah pusat. Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi proses replikasi atau pengembangan yang diperlukan serta pendanaan yang lebih akurat untuk mengetahui hasil pencapaian program 3R secara nasional.

E. Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat

1. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat mampu memberikan kontribusi partisipatif bagi pengelolaan sampah karena pengelolaan sampah berbasis masyarakat sendiri tidaklah hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya. Davis dikutip oleh Ndraha (1983:42) mendefinisikan partisipasi sebagai keterlibatan mental dan emosi seseorang atau suatu kelompok masyarakat di dalam situasi kelompok yang mendorong yang bersangkutan atas kehendak sendiri (kemauan bebas) menurut kemampuan (swadaya) yang ada untuk mengambil bagian dalam usaha pencapaian tujuan bersama dan dalam pertanggung jawabannya. Secara umum pengertian dari partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah keperansertaan semua anggota atau wakil-wakil masyarakat untuk ikut membuat keputusan dalam proses perencanaan dan pengelolaan sampah termasuk di dalamnya memutuskan tentang rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, manfaat yang akan diperoleh, serta bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya.

Dalam konteks pengelolaan sampah, partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam upaya pengelolaan sampah. Keberhasilan pengelolaan sampah tergantung dari partisipasi masyarakat sebagai penghasil utama sampah. UU No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga mencakup aspek non teknis seperti cara mengorganisir, mengatur, membiayai, dan melibatkan masyarakat penghasil limbah sehingga dapat ikut berpartisipasi. Sebab masyarakat pada hakekatnya adalah sumber awal penumpukan sampah. Untuk itu, masyarakat harus berperan untuk menjalankan fungsi tertentu dalam konteks pengelolaan persampahan. Dalam hal ini, salah satu peran penting yang dapat dijalankan oleh masyarakat adalah melakukan pemisahan sampah sejak dari sumbernya.

Terdapat beberapa indikator-indikator dalam partisipasi. Setiap indikator diukur pada segi-segi menurut ukuran-ukuran tertentu. Segi-segi indikator tersebut antara lain:

- a. Keterlibatan (langsung atau tidak langsung; dalam bentuk apa: kehadiran, uang dsb);
- b. Prakarsa (frekuensi dan saluran);
- c. Swadaya (kemampuan);
- d. Tanggungjawab (pemeliharaan, penggunaan, pengusaha, pengaturan lebih lanjut, dan sebagainya); dan
- e. Jumlah anggota masyarakat yang terlibat atau melibatkan diri (Ndraha, 1983:43).

Berdasarkan pandangannya, partisipasi atau keterlibatan warga masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat dilihat dari dua hal, yaitu:

a. Partisipasi dalam perencanaan

Segi positif dari partisipasi dalam perencanaan adalah program-program yang telah direncanakan bersama sedangkan segi negatifnya adalah adanya kemungkinan tidak dapat dihindari pertentangan antar kelompok dalam masyarakat yang dapat menunda atau bahkan menghambat tercapainya keputusan bersama. Disini dapat ditambahkan bahwa partisipasi secara langsung dalam perencanaan hanya dapat dilaksanakan dalam masyarakat kecil, sedangkan untuk masyarakat yang besar sukar dilakukan. Namun dapat dilakukan dengan sistem perwakilan. Masalah yang perlu dikaji adalah apakah yang duduk dalam perwakilan benar-benar mewakili warga masyarakat.

b. Partisipasi dalam pelaksanaan

Segi positif dari Partisipasi dalam pelaksanaan adalah bahwa bagian terbesar dari program (penilaian kebutuhan dan perencanaan program) telah selesai dikerjakan. Tetapi segi negatifnya adalah kecenderungan menjadikan warga negara sebagai obyek pembangunan, dimana warga hanya dijadikan pelaksana pembangunan tanpa didorong untuk mengerti dan menyadari permasalahan yang mereka hadapi dan tanpa ditimbulkan keinginan untuk mengatasi masalah. Sehingga warga masyarakat tidak secara emosional terlibat dalam program, yang berakibat kegagalan seringkali tidak dapat dihindari.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan menurut Suhendra (2006:74) adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif, dengan keterlibatan semua potensi. Dengan cara ini akan memungkinkan terbentuknya masyarakat madani yang majemuk, penuh keseimbangan antara kewajiban dan hak, saling menghormati tanpa ada yang merasa asing dalam komunitasnya. Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan bahwa masyarakat diberi kuasa, dalam upaya untuk menyebarkan kekuasaan, melalui pemberdayaan masyarakat, organisasi agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya untuk semua aspek kehidupan politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pengelolaan lingkungan dan sebagainya.

Sumaryo yang dikutip oleh Mawardi (2007:9) menyebutkan pemberdayaan masyarakat itu sendiri adalah suatu proses yang mengembangkan dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk terus terlibat dalam proses pembangunan yang berlangsung secara dinamis sehingga masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi serta dapat mengambil keputusan secara bebas (*independent*) dan mandiri. Senada dengan itu Margono yang juga dikutip oleh Mawardi (2007:9) mengemukakan pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkan kondisi dan situasi sedemikian rupa hingga masyarakat memiliki daya dan kesempatan untuk mengembangkan kehidupannya tanpa adanya kesan bahwa perkembangan itu adalah hasil kekuatan eskternal, masyarakat harus dijadikan subyek bukan obyek.

Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah menurut Damanhuri dan Padmi yang dikutip oleh Silalahi (2009:16) adalah dengan melakukan perubahan bentuk perilaku yang didasarkan pada kebutuhan atas kondisi lingkungan yang bersih yang pada akhirnya dapat menumbuhkan dan mengembangkan peran serta dalam bidang kebersihan. Perubahan bentuk perilaku masyarakat dapat terwujud apabila ada usaha untuk membangkitkan masyarakat dengan mengubah kebiasaan, sikap, perilaku terhadap kebersihan/sampah tidak lagi didasarkan kepada keharusan atau kewajibannya, tetapi lebih didasarkan kepada nilai kebutuhan. Untuk mengubah kebiasaan tersebut maka diperlukan sosialisasi terhadap peran serta masyarakat yang dilakukan secara menyeluruh, yaitu kalangan pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat. Hal ini merupakan kolaborasi seluruh *stakeholder* untuk berperanserta dalam mengelola sampah. Keberhasilan pengelolaan sampah sangat bergantung kepada kesadaran dan kemauan untuk ikut berperanserta.

Menyertai konsep dari pemberdayaan masyarakat melekat indikator-indikator dari masyarakat yang berdaya. Terdapat beberapa indikator dari masyarakat yang berdaya, antara lain:

- a. Mempunyai kemampuan menyiapkan dan menggunakan pranata dan sumber-sumber yang ada di masyarakat.
- b. Dapat berjalannya "bottom up plannig".
- c. Kemampuan dan aktivitas ekonomi.
- d. Kemampuan menyiapkan hari depan keluarga.
- e. Kemampuan menyampaikan pendapat dan aspirasi tanpa adanya tekanan (Suhendra, 2006:86).

Masyarakat yang berdaya akan mampu dan kuat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, mampu mengawasi jalannya pembangunan dan juga menikmati

hasil pembangunan. Selanjutnya Harry Hikmat dikutip oleh Mawardi (2007:9) menjelaskan ada beberapa faktor internal yang menghambat pemberdayaan antara lain: kurang bisa untuk saling mempercayai, kurang daya inovasi/kreativitas, mudah pasrah/menyerah/putus asa, aspirasi dan cita-cita rendah, tidak mampu menunda menikmati hasil kerja, wawasan waktu yang sempit, familisme, sangat tergantung pada bantuan pemerintah, sangat terikat pada tempat kediamannya dan tidak mampu/tidak bersedia menempatkan diri sebagai orang lain.

Pemberdayaan terutama dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat merupakan proses belajar yang produktif dan reproduktif. Produktif dalam pengertian mampu mendayagunakan potensi diri, kelompok, dan lingkungan. Kerjasama antar individu maupun kelompok untuk memperoleh kemanfaatan material dan immaterial bagi masyarakat pada suatu jangka waktu tertentu. Reproduktif dalam pengertian mampu mewariskan nilai-nilai kearifan dalam masyarakat.

F. Sampah

1. Pengertian Sampah

Sampah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas kehidupan sehari-hari manusia. Oleh karena itu, perlu dipahami pengertian daripada sampah itu sendiri. Apriadji dikutip oleh Sasmita (2009:6) mendefinisikan sampah sebagai zat-zat atau benda-benda yang sudah tidak dipergunakan lagi, baik berupa bahan buangan yang berasal dari rumah tangga maupun sisa proses hasil industri. Zat-zat yang dimaksud adalah zat cair, zat gas, dan zat padat yang sudah tidak berguna lagi.

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Hadiwiyoto (1983:12) yang mendefinisikan sampah sebagai sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan, baik karena telah diambil bagian utamanya, atau karena pengolahan, atau karena sudah tidak ada manfaatnya, yang ditinjau dari segi sosial ekonomis tidak ada harganya dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan kelestarian. Untuk menghindari terjadinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sampah, maka diperlukan sistem pengelolaan sampah.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sampah merupakan zat-zat atau benda-benda baik itu bersifat cair, gas, maupun padat yang sudah tidak dipergunakan lagi karena dilihat dari segi sosial ekonomis tidak ada harganya dan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan apabila tidak dikelola.

2. Sumber-Sumber Sampah

Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menghasilkan timbunan sampah. Sumber-sumber timbunan sampah dapat digolongkan atas tiga kelompok:

a. *Domestic refuse*

Merupakan sisa makanan, bahan dan peralatan yang sudah tidak terpakai lagi dalam rumah tangga, sisa pengolahan makanan, bahan pembungkus, bermacam-macam kertas, kain bekas, kaleng dan lain-lain.

b. *Comercial refuse*

Merupakan sampah yang berasal dari tempat-tempat perdagangan seperti pasar, supermarket, pusat pertokoan, warung dan tempat jual beli lainnya. Biasanya sampah yang berasal dari kegiatan perdagangan ini terdiri dari berbagai jenis, seperti bahan dagangan yang rusak, kertas, plastik dan daun pembungkus, bagian komoditi yang tidak dapat dimanfaatkan, peralatan yang rusak dan lain-lain.

c. *Industrial refuse*

Merupakan sampah yang berasal dari kegiatan industri, jumlah dan jenisnya sangat tergantung pada jenis dan jumlah bahan yang diolah oleh perusahaan perindustrian tersebut. Suatu perindustrian biasanya membuang limbah sampahnya di sekitar perusahaan tersebut, sehingga sering mencemari lingkungan di sekelilingnya. Sampai sekarang pembuangan sampah dan limbah industri masih belum dapat diatur dengan baik, sehingga merupakan sampah paling banyak menimbulkan pencemaran lingkungan (Bahar, 1986:5).

Sumber-sumber sampah yang lebih rinci lagi diajukan oleh Gumbira (1987:12) yang menyatakan minimal ada empat sumber sampah yaitu:

1) Sampah domestic

Sesuai dengan asal katanya, maka sampah ini berasal dari lingkungan perumahan daerah perkotaan maupun pedesaan. Ragam sampah di daerah perkotaan biasanya lebih banyak serta jenis sampah anorganiknya secara kuantitatif dan kualitatif lebih kompleks. Sampah di pedesaan umumnya lebih berupa bahan-bahan organik sisa produk pertanian, sedangkan sampah anorganiknya lebih sedikit.

2) Sampah komersial

Yang dimaksud sampah komersial tidaklah berarti sampah tersebut mempunyai nilai ekonomi untuk dapat langsung diperdagangkan, tetapi lebih merujuk kepada jenis kegiatan yang menghasilkannya. Sampah komersial

dihasilkan dari lingkungan kegiatan perdagangan seperti toko, warung, restoran, dan pasar atau toko swalayan. Keragaman jenis sampahnya sangat tinggi, dan dapat berupa bahan organik maupun anorganik.

3) Sampah industri

Seperti yang telah disebutkan di muka. Sampah ini merupakan hasil samping kegiatan industri, yang jenisnya sangat tergantung pada kegiatan industri itu sendiri.

4) Sampah alami dan lainnya

Sampah jenis ini dapat berupa dedaunan, sisa bencana alam dan lain-lain. Selain itu dapat juga merupakan sampah-sampah yang dihasilkan oleh taman, tempat-tempat rekreasi, kendaraan umum, terminal, pelabuhan udara dan lain-lain.

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai sumber-sumber sampah di atas, maka dapat ditarik kesimpulan yang menjadi sumber-sumber sampah antara lain: sampah domestik, sampah komersial, sampah industri, sampah alami, sampah dari jalanan, sampah dari bangkai binatang yang mati, pembersihan dan pembangunan suatu tempat, sampah dari tempat produksi pertanian dan lain-lain.

3. Permasalahan Sampah

Sampah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup yang sampai saat ini masih belum dapat ditangani secara baik terutama pada negara-negara yang sedang berkembang, sedangkan kemampuan dalam pengelolaan sampah tidak seimbang dengan produksinya. Sampah yang tidak terurus dengan baik akan menyebabkan menurunnya kesehatan dan nilai estetika lingkungan karena

pencemaran air, udara, dan berkembangnya hama penyakit sehingga permukiman penduduk di sekitar tumpukan sampah tersebut tidak layak lagi bagi penduduk.

Masalah-masalah sampah yang timbul di kota-kota besar adalah karena sulitnya pengumpulan, pengangkutan, pembuangan, pemanfaatan, dan pemusnahan sampah, baik sampah yang berasal dari rumah tangga, pasar, industri maupun kantor (Bahar, 1986:2). Sulitnya penanganan sampah erat kaitannya dengan buruknya kondisi permukiman penduduk, karena pertumbuhan permukiman yang semrawut mempersulit proses pengumpulan dan pengangkutan sampah sehingga akhirnya menumpuk.

Meningkatnya jumlah penduduk sangat mempengaruhi peningkatan jumlah dan keragaman sampah. Semakin meningkatnya laju pertumbuhan penduduk, baik karena kelahiran ataupun migrasi, perilaku masyarakat yang semakin mengutamakan ego pribadinya, tingkat pendidikan yang relatif rendah, dan adanya perubahan standar hidup masyarakat yang mengutamakan produk hasil kebudayaan modern untuk konsumsinya, menyebabkan makin meningkatnya jumlah dan keragaman sampah (Gumbira, 1987:14).

Kebudayaan modern saat ini sepertinya sangat mempengaruhi jumlah sampah dan limbah yang berpotensi untuk mencemari lingkungan. Seiringan dengan meningkatnya kebutuhan manusia, produksi sampah dan limbah juga akan terus meningkat. Selama ini usaha yang dilakukan untuk menangani sampah dan limbah tersebut adalah bagaimana cara membuangnya, akan tetapi masalah baru timbul karena lahan tempat pembuangan sampah dan limbah semakin sempit. Lokasi yang semakin jauh dari kota dan pada masyarakat di sekitar tempat

pembuangan sampah timbul ancaman berbagai jenis penyakit yang bersumber dari sampah dan limbah.

Perencanaan dalam penanganan sampah merupakan masalah yang kompleks karena harus memperhitungkan sistem transportasi, penggunaan lahan, perkembangan masyarakat, dan daerah serta kesehatan masyarakat (Bahar, 1986:2). Penanganan sampah tidak cukup hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga harus melibatkan pihak swasta dan masyarakat serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Sedangkan kota-kota di Indonesia umumnya tidak mempunyai kemampuan yang cukup dalam menangani sampah secara keseluruhan karena kurangnya modal, tenaga professional, dan teknologi yang memadai. Oleh karena itu keefektifan dalam pengelolaan sampah sangat tergantung dari kesadaran masyarakat, swasta, dan pemerintah dalam menyimpan, mengumpulkan, dan menimbun sampah dengan koordinasi dan pengaturan tempat pembuangan sampah yang baik.